

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan politik pada hakikatnya adalah rangkaian usaha untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, agar tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Permasalahan yang di hadapi adalah partisipasi politik generasi muda belum dimaksimalkan dan generasi muda masih belum paham akan sesungguhnya pendidikan politik, sehingga partisipasi politik masih rendah, hal tersebut dikatakan Affandi dan Anggraeni (2011: 39) :

...generasi muda merupakan aset partisipasi dalam politik yang masih

belum dimaksimalkan. Generasi muda masih belum paham akan sesungguhnya pendidikan politik yang ada. Alhasil, partisipasi terhadap politik pun masih rendah.

Pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut, untuk itu pendidikan kewarganegaraan perlu diajarkan di sekolah dengan alasan bahwa siswa memerlukan pengertian yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai politik baik sebagai kerangka berpikir dalam mengambil keputusan maupun sebagai landasan dalam diskusi umum.

Dalam konteks ini peranan dan tanggungjawab sekolah seyogianya mampu memperkuat kebajikan siswa dan kesadaran sebagai warga negara dan membantu siswa untuk melihat kesesuaiannya dari aspek kewarganegaraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan didalamnya terdapat pengembangan kompetensi warga negara untuk membentuk partisipasi siswa sebagai bagian dari warga negara yang bermutu dan bertanggungjawab. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam kegiatan menjelaskan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan siswa dalam nilai-nilai politik.

Branson (dalam Winataputra & Budimansyah, 2007 : 185) menyatakan pendapatnya bahwa tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu;
2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris;
3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan
4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Sejalan dengan pendapat di atas Somantri (2001:299) menjelaskan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Suryadi (2000:24) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada empat hal *Pertama*, Pendidikan Kewarganegaraan bukan lagi sebagai indoktrinasi politik. *Kedua*, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggungjawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. *Ketiga*, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air ke dalam gelas *watering down* seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika.

Tarjana Nataraharja, 2012

Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pkn Dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Keempat, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang.

Winataputra (2001:317) memandang bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru mengusung tujuan utama mengembangkan “*civic competences*” yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan *civic skills* (perangkat kecakapan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogianya dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (kecakapan intelektual) dan *participation skills* (kecakapan partisipasi).

Kompetensi kewarganegaraan yang ketiga adalah watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Inti watak-watak kewarganegaraan adalah

kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggungjawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. Pengembangan *civic disposition* akan memungkinkan proses politik berjalan dengan efektif untuk memajukan kepentingan umum dan memberi kontribusi terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak individu.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa komponen kompetensi kewarganegaraan yang hendak dikembangkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah komponen *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), komponen *civic skills* (kecakapan berpikir kritis, rasional, kreatif dan kecakapan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), *civic disposition* (berkembang demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, dan berinteraksi dengan bangsa lain di era globalisasi).

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sehubungan dengan konteks pengembangan partisipasi politik secara umum mempunyai pesan dalam mengantarkan warga negara untuk menjadi semakin dewasa dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dengan kata lain, menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggungjawab (*civic responsible*). Didasari Pendidikan Kewarganegaraan yang berintikan pendidikan politik demokrasi mencakup pengembangan kompetensi-kompetensi kewarganegaraan yang menekankan bukan hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga ke arah pengembangan kecakapan dan sikap-sikap atau watak-watak yang harus dimiliki warga negara dalam berpartisipasi politik.

Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut di atas dengan judul **“Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PKn dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Subang)”**

B. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi persoalan inti dan menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan?”

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, masalah pokok dapat dijabarkan menjadi sub-sub masalah yang akan dijadikan pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana materi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan?

2. Bagaimana metode pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan?
3. Bagaimana media pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan?
4. Bagaimana sumber pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan?
5. Bagaimana evaluasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini berisi uraian tentang rumusan hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa selaku peneliti yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengapa penelitian dilakukan. Tujuan berkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum penelitian tersebut maka tujuan khusus penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui materi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui metode pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui media pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.
4. Untuk mengetahui sumber pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.
5. Untuk mengetahui evaluasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Akademis :

Secara akademis (keilmuan) diharapkan penelitian tentang implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, dapat menjadi tambahan referensi untuk mengkaji dan merumuskan ilmu pengetahuan tentang pendidikan politik sebagai upaya dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bahan pertimbangan bagi para akademisi atau komunitas akademik, mengenai materi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kompetensi kewarganegaraan.
- b. Bahan pertimbangan Dinas Pendidikan dan sekolah dalam membuat kebijakan mengenai implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn.
- c. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan program pendidikan politik.
- d. Memberi gambaran kepada sekolah dan Guru PKn di sekolah dalam mengembangkan pola pendidikan politik.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang terdapat dalam penelitian ini berikut disampaikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik

Alfian (1992 : 23) memberikan pengertiannya mengenai pendidikan politik, yakni :

Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

2. Pendidikan Kewarganegaraan

(Cogan; Kerr dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007:4) :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio cultural, bahasa, usia, dan suku bangsa menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003;7)

3. Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada tiga kompetensi penting yang harus dimiliki kewarganegaraan yang diadopsi dari pendapat Branson dalam Winataputra dan Budimansyah (2007 : 186) yaitu :

- a. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara;
- b. *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan

Tarjana Nataraharja, 2012

Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pkn Dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- c. *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

F. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : BAB I Pendahuluan ; Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah; Pendidikan Politik, Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi Kewarganegaraan, Struktur Organisasi Tesis. BAB II Kajian Pustaka ; Bab ini membahas tentang ; Pendidikan Politik (Konsep Pendidikan Politik, Tujuan Pendidikan Politik, Urgensi Pendidikan Politik), Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan; Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, Sumber Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan), Kompetensi Kewarganegaraan (Pengertian dan komponen-komponen kompetensi kewarganegaraan, Pengetahuan Kewarganegaraan/Civic Knowledge, Kecakapan Kewarganegaraan/Civic Skills, Watak Kewarganegaraan/Civic Disposition, Hasil Penelitian terdahulu yang relevan (Idrus Affandi (1996) mengenai Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Pendidikan Politik, Wilda Nurul Fajar (2010) mengenai Model Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik). BAB III Metode Penelitian; Bab ini memuat tentang; Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data

Tarjana Nataraharja, 2012

Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pkn Dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

(Wawancara Mendalam, Studi Dokumentasi, Observasi Partisipasi), Teknik Analisis Data (Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan dan Verifikasi), Lokasi dan subjek Penelitian (Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian). BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini membahas tentang ; Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian. BAB V Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini membahas tentang Kesimpulan umum, Kesimpulan Khusus dan Saran.

